

## **Analisis Pengaruh Koneksi Politik dan *Corporate Governance* Terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) Industri Perbankan Indonesia**

**Azza Mahandani Wardah**

Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta  
azzamahandani@student.uns.ac.id

**Putri Nugrahaningsih**

Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta

**Abstract :** *Disclosure of sustainability reports is increasingly intensified by the government, one of which is through regulations listed in OJK Number 51/POJK.03/2017 concerning Implementation of Financial Sustainability of Financial Services Institutions, Issuers, and Public Companies, must report the sustainability of the report separately. The concept initiated by Elkington in 1988, Triple Bottom Line (TBL)-contained three pillars to assess the success of a company in terms of economic, environmental, and social (people, planet, and profit). Established on the Global Reporting Initiative G4 (GRI-G4) indicators consisting of 91 items and GRI-Standards Global Reporting Initiative Indicators. Sample selection with purposive sampling shows 33 financial statements from 11 banking sector companies in 2016 until 2018. In terms of political connection of the board of commissioners and directors as well as government ownership and also foreign ownership variables do not affect the disclosure of corporate social responsibility in the Indonesian banking industry. Disclosure of corporate social responsibility has been negatively affected by the independent commissioner variable. Managerial ownership proves that these variables have a positive effect on disclosure of corporate social responsibility. The foreign ownership variable indicates that there is no influence, which means foreign capital ownership is not influenced by corporate social responsibility, especially in the banking industry in Indonesia. According to the results of statistical tests, the size of the company assets does not affect the disclosure of corporate social responsibility, especially in the banking industry in Indonesia.*

**Keyword:** Sustainability Report, GRI Standards, Banking Industry, CSR.

### **PENDAHULUAN**

Beberapa tahun terakhir, kesadaran global akan masalah tanggung jawab sosial telah meningkat dan itu mempengaruhi perusahaan dari perspektif tentang sensitivitas sosial. Untuk itu, konsep tanggung jawab sosial akhirnya mulai menjadi akuntabel melalui pengungkapan di dalam laporan publikasi perusahaan. Perusahaan publik penting akan pengungkapan aktivitas yang berhubungan dengan lingkungan dan sosial karena *stakeholders*, investor, konsumen, nasabah, pelanggan atau klien perlu wujud transparansi dan akuntabilitas manajemen perusahaan.

Penyediaan informasi secara terbuka dari perusahaan akan digunakan sebagai pertimbangan pengambilan kebijakan oleh pengguna laporan keuangan. Pengungkapan tanggung jawab sosial adalah bagian dari analisis partisipasi sosial dalam mencapai sasaran bisnis.

Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, juga dikenal sebagai *Corporate Social Responsibility* (CSR) di Indonesia, ketentuan tersebut semakin terkonsentrasi oleh pemerintah, yang mana penerapannya bersifat *mandatory* atau wajib bagi perusahaan publik sebagaimana ditentukan dalam Peraturan OJK 51/POJK.03/2017 tentang Implementasi Laporan Keberlanjutan dari Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kaitannya dengan peraturan tersebut, meminta lembaga keuangan memaksimalkan transparansi keterangan laporan terkait praktik kegiatan yang bersinggungan dengan sosial perusahaan. Daya upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi keuangan melalui peraturan yang dikeluarkan OJK tersebut. Meskipun peraturan tersebut bersifat wajib bagi lembaga jasa keuangan, perusahaan-perusahaan perbankan belum memiliki pedoman standar perihal spesifikasi pelaporan yang harus dilakukan, dengan adanya Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKBL) dan Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) yang dilakukan OJK untuk melancarkan inisiasi agar setiap perusahaan perbankan mengadakan pelaporan secara rutin setiap tahunnya (cnbcindonesia.com, 2018).

Berdasarkan Pasal 1(3) UU No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, ia menjelaskan bahwa tanggung jawab sosial menggambarkan pembangunan ekonomi berkelanjutan melalui meningkatkan mutu hidup dan sifat yang menguntungkan bagi bisnis, kelompok sosial lokal dan kelompok sosial umum. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 66 (2) UU No. 40 tahun 2007, direksi wajib untuk menyerahkan laporan tahunan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), yang salah satu klausulnya harus berisi laporan tentang praktik implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan. Peraturan-peraturan ini harus diperhatikan oleh semua perusahaan terlibat agar terus menjalankan usahanya secara berkelanjutan. Munculnya peraturan-peraturan tersebut memberikan bukti bahwa pemerintah memiliki titik berat untuk memotivasi perusahaan atensi dengan lingkungan sosialnya. Adanya peraturan tersebut aktivitas dan perencanaan kegiatan perusahaan harus secara bersama-sama mempertimbangkan faktor yang berbeda yang akan diusahakan mampu menggambarkan kinerja lingkungan sosial dan diharapkan dapat menggambarkan tanggung jawab sosial perusahaan.

Berkenaan dengan tanggung jawab sosial perusahaan, sektor perbankan perusahaan publik juga diharuskan untuk memastikan transparansi dalam tanggung jawab sosial perusahaan, khususnya melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) seperti ketetapan Peraturan Menteri BUMN nomor 09/MBU/VII/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan. Kesejahteraan lingkungan dan sosial yang merupakan salah satu tujuan dari program tanggung jawab sosial. Selain itu, seperti yang tertuang dalam

Peraturan OJK Nomor 51/POJK.III/2017 tentang Implementasi Keuangan Keberlanjutan Lembaga Jasa Keuangan, Perusahaan, dan Emiten. Pernyataan wajib untuk melaporkan *Sustainability Report* secara terpisah. Berdasarkan peraturan tersebut dapat diartikan bahwa industri perbankan harus melaporkan Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) secara terpisah.

Nurjanah (2019) mengatakan bahwa secara global CSR dapat dideskripsikan sebuah komitmen bisnis yang diadakan perusahaan untuk meningkatkan kondisi semua dimensi ekonomi, kemasyarakatan, dan lingkungan demi pengembangan yang terus menerus. Berkaitan dengan perumusan kebijakan dalam meningkatkan semua dimensi ekonomi, sosial dan lingkungan perusahaan, koneksi politik dianggap memiliki peran baik dalam pembentukannya. Koneksi politik merupakan bagian dari faktor yang diduga berpengaruh kepada strategi pengungkapan informasi tanggung jawab sosial. Faccio, Masulis, & McConnell (2006) mengemukakan bahwa koneksi politik dari aspek rasio politisi dalam dewan komisaris dan direksi dapat dilihat dan dihitung dengan jumlah pemegang saham mayoritas anggota dewan, atau pimpinan dalam perusahaan yang memiliki jabatan sebagai anggota parlemen, pejabat tinggi negara, atau memiliki keterkaitan erat dengan partai politik.

Chen, Guan, Zhang, & Zhao (2017) menyatakan bahwa hasil penelitiannya yang dilakukan pada berbagai negara di seluruh dunia membuktikan bahwa perusahaan yang terkoneksi politik mendapat perlakuan istimewa dan berbeda dalam hal pengadaan pemerintah seperti akses yang lebih mudah terhadap dana publik contohnya pembebasan pajak. Selain itu, Khan, Mihret, & Muttakin (2016) berpendapat bahwa manajemen khususnya eksekutif dan direksi yang terhubung politik akan memanfaatkan hubungan atau jaringan mereka untuk memengaruhi hasil perusahaan yang secara otomatis akan memperkuat posisi para eksekutif dan direksi yang terkoneksi politik tersebut.

Tata kelola perusahaan (*corporate governance*) ditengarai menjadi elemen lain yang memengaruhi pengungkapan informasi tanggung jawab sosial dalam penelitian ini. Berdasarkan pedoman yang dilahirkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* tahun 2004, menurut pedoman tersebut menyatakan kemelut yang terjadi pada akhir tahun 1997 pada perbankan Indonesia tidak hanya dikarenakan oleh darurat komersial, melainkan juga belum adanya landasan *good corporate governance*. Akhir-akhir ini praktik GCG sudah mulai dilakukan oleh berbagai perusahaan, tetapi memang masih sangat tertinggal. Hal ini dibuktikan dengan peringkat ASEAN *Corporate Governance Scorecard* Indonesia pada tahun 2015, hanya ada dua emiten yang masuk pada daftar Top 50 ASEAN ([investasi.kontan.co.id](http://investasi.kontan.co.id), 2018).

Pada tahun 2015, prinsip G20/OECD yang baru tentang Tata Kelola perusahaan (CG) diluncurkan di Jakarta oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD), prinsip ini diluncurkan menanggapi pesatnya perubahan dan pertumbuhan bisnis pada era saat ini dengan tujuan meringankan

para pelaku pasar demi menelaraskan pengamalan GCG. Adanya prinsip-prinsip dan peraturan yang dikeluarkan, diharapkan perusahaan dapat melaksanakan aplikasi *corporate governance* perusahaan dengan tertib. Implementasi GCG diupayakan kapabel untuk melakukan penanggulangan dan pengawasan terhadap permasalahan isu- isu lingkungan sosial perusahaan yang berkaitan dengan kegiatan operasional bisnis perusahaan.

Pengungkapan tanggung jawab sosial dapat dipengaruhi oleh *corporate governance* karena dengan mempertahankan teknik prosedur *corporate governance* yang unggul akan memperluas kemampuan perusahaan serta akan meningkatkan investor individu, dengan adanya kepercayaan ini perusahaan akan memengaruhi pertanggungjawaban perusahaan untuk membangun perusahaan berkelanjutan (Stuebs & Sun, 2015). Cong & Freedman (2011) berpendapat bahwa perusahaan yang bertanggung jawab kepada *stakeholder* dengan mengimplemetasikan *corporate governance* yang sehat, maka pertanggungjawaban tersebut harus meliputi tanggung jawab sosial perusahaan yang setinggi-tingginya. Tujuan studi ini adalah untuk menganalisis dan membuktikan bahwa pengaruh koneksi politik dan *corporate governance* terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada industri perbankan Indonesia periode 2016-2018.

## **KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

### ***Stakeholder Theory***

Konsep yang digagas oleh Hill & Jones (1992) menyatakan *stakeholder theory* membahas perihal afiliasi yang terjalin antara perusahaan dan pemangku kepentingan merupakan kejadian yang penting. Kemampuan perusahaan dipengaruhi afiliasi berbagai kelompok seperti pelanggan, pemasok, karyawan, pemegang saham, dan masyarakat tersebut merupakan pemangku kepentingan. Perusahaan mampu dikatakan berhasil dan berkelanjutan, dalam bisnisnya harus menjaga selera pelanggan, pemasok, karyawan, pemegang saham, dan masyarakat.

Persepsi kewajiban sosial perusahaan telah banyak diketahui oleh banyak kalangan di Indonesia. Secara umum diketahui dengan sebutan *stakeholder theory* yang artinya komplemen, pemenuhan kebutuhan undang-undang, kriteria, penghargaan lingkungan dan masyarakat, serta kewajiban kalangan pengusaha untuk partisipasi mewujudkan pembangunan secara berkesinambungan dan berkelanjutan (Ali & Isa, 2018).

### **Teori Legitimasi**

Konsep yang digagas oleh Suchman (1995) teori legitimasi berfokus pada fungsi informasi dan pengungkapan relevansinya dengan afiliasi organisasi, masyarakat, dan pemerintah. Legitimasi adalah kaidah bahwa aktivitas perusahaan adalah akurat, benar, dan baik searah melalui teknik prosedur, kriteria, anutan, bersama harapan masyarakat yang dibangun

menurut kemasyarakatan. Oleh karena itu, dari definisi ini teori legitimasi menjelaskan kegiatan praktik CSR sebagai norma, nilai, kebiasaan, dan sikap perusahaan.

Penerimaan dan pengakuan masyarakat terhadap kegiatan perusahaan merupakan fokus dari legitimasi (Arora & Lodhia, 2016). Perusahaan akan berkelanjutan apabila sistem dan aktivitas perusahaan terjadi kesesuaian dengan sistem norma yang ada dalam masyarakat. Oleh karena itu, fokus yang perlu dibangun oleh perusahaan dengan cara mengendalikan reputasi perusahaan yaitu membentuk kinerja masyarakat dan lingkungan untuk mendapat pengesahan (*legitimate*) dengan norma masyarakat (Bebbington, Larrinaga, & Moneva, 2008).

### **Teori Keagenan**

Konsep yang merupakan buah pikiran Jensen & Meckling (1976) mengemukakan bahwa teori keagenan telah dikembangkan lebih lanjut berdasarkan pada hubungan agen utama. Hubungan tersebut tentang hubungan kerja pemegang saham (pemilik perusahaan) dengan manajemen. Sun, Salama, Hussainey, & Habbash (2010) menyatakan bahwa teori keagenan dapat mengatasi masalah keagenan melalui peninjauan kegiatan manajemen, mengontrol perilaku manajemen yang berpusat pada diri sendiri, memaksimalkan dan menyelidiki proses pelaporan keuangan.

Persoalan keagenan kerap muncul akibat perselisihan relevansi antara pemilik dan manajer perusahaan. Organisator seperti manajer mempunyai kecenderungan untuk memaksimalkan ketertarikan mereka dengan mengorbankan kesejahteraan pemegang saham (Jensen, *et.al.* 1976). Menggunakan mekanisme pemantauan dan akuntabilitas tingkat tinggi melalui pengungkapan diyakini akan mengurangi konflik agensi manajemen dan pemilik, karena pengungkapan tingkat tinggi dapat menggambarkan bahwa bisnis lebih terlibat dalam praktik tersebut.

### **Corporate Social Responsibility (CSR)**

Persepsi yang digagas oleh Elkington (1998) mengemukakan bahwa terdapat konsep *triple bottom line* (TBL) yang memperlihatkan perusahaan bertanggungjawab akan sosialnya dengan menyampaikan atensi kepada pengembangan mutu perusahaan (*profits*); masyarakat (*people*); serta lingkungan hidup (*planet*). Berdasarkan definisi tersebut mengindikasikan bahwa CSR merupakan wujud aktivitas perusahaan yang dimaksudkan untuk memaksimalkan ekonomi perusahaan namun juga diiringi dengan eskalasi tingkat kualitas lingkungan hidup, masyarakat khususnya karyawan dan keluarga serta komunitas umum dengan pertimbangan perusahaan yang etis. Pedoman *Global Reporting Initiative* (GRI) digunakan sebagai indeks kriteria pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Petunjuk ini menyediakan etika pelaporan dan standar pengungkapan serta buku petunjuk penerapan untuk menyusun laporan keberlanjutan bagi organisasi. Selain itu, *Global Reporting Initiative* (GRI) menyajikan pustaka acuan bagi golongan yang berpartisipasi secara internasional dengan kriteria tata kelola,

prestasi perusahaan, dan dampak lingkungan, ekonomi, dan sosial perusahaan. Berdasarkan indeks dari *Global Reporting Initiative G4 (GRI-G4)* yang terdiri dari 91 elemen dan indeks *GRI-Standards* yang terdiri dari 136 elemen, keduanya memiliki penekanan yang sama, yaitu rantai nilai dan kesetaraan gender dalam setiap aspek keberlanjutan. *Materiality* dan *boundary* masih menjadi prinsip laporan keberlanjutan guna menjadi landasan dalam penentuan isi laporan keberlanjutan ([www.globalreporting.org](http://www.globalreporting.org), 2020). Perhitungan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan adalah sebagai berikut: Poin 0 (nol) : Apabila indeks pada daftar GRI tidak diungkapkan perusahaan. Poin 1 (satu) : Apabila indeks pada daftar GRI diungkapkan perusahaan.

### **Koneksi Politik dan Pengungkapan *Corporate Social Responsibility (CSR)***

Konsep yang diprakarsai oleh Faccio (2006) industri yang memiliki koneksi politik adalah perusahaan yang setidaknya merupakan salah satu pemegang saham mayoritasnya adalah anggota dewan komisaris, direksi, atau pimpinan dalam perusahaan memiliki keterkaitan erat dengan partai politik atau memiliki jabatan sebagai pejabat tinggi negara, atau anggota dewan. Selain itu, menurut Wu, *et al.* (2012) institusi dikatakan menyandang interelasi politik apabila dewan dalam perusahaan atau CEO sedang atau eks pejabat di militer ataupun pemerintahan.

Perusahaan yang terkoneksi politik memiliki kualitas kemampuan sosial dan lingkungan lebih baik serta kualitas pengungkapan tanggung jawab sosial lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang tidak terkait secara politis (Osazuwa, *et al.*, 2015). Hasil studi juga membuktikan bahwa pengungkapan tanggung jawab sosial secara positif dipengaruhi oleh hubungan politik.

H<sub>1a</sub>: Koneksi politik dari dewan komisaris dan direksi berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

H<sub>1b</sub>: Koneksi politik dari kepemilikan pemerintah berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

### ***Corporate Governance***

Sebagaimana yang tertuang dalam Pedoman *Good Corporate Governance (GCG)* dari Bank Indonesia (2004), pemutakhiran pengaruh tata kelola perusahaan yang baik tersebut benar-benar penting bagi dunia internasional dan kepercayaan masyarakat sebagai syarat industri perbankan untuk tumbuh sebagai institusi yang sehat serta baik. Sebagaimana yang tertuang dalam pedoman GCG, tata kelola didefinisikan sebagai suatu sistem dan praktik penyelenggaraan bisnis yang baik dan beretika. Berdasarkan definisi tersebut, *corporate governance* tertarik untuk menjaga keseimbangan antara tujuan ekonomi dan sosial dan tujuan pribadi dan masyarakat (Khan, 2010).

Menurut Khan (2010) di belakang permasalahan akuntansi, kepemimpinan, dan tata kelola di perusahaan besar, *corporate governance* telah berhasil menarik banyak ketertarikan. Hal ini

dikarenakan manajer tidak hanya berfokus pada hubungan jangka panjang, yang harus berurusan dengan *checks, balances*, dan insentif tetapi juga komunikasi antara manajemen dan investor tetap serta hubungan transaksional, yang mana kewajiban tersebut melibatkan dan berurusan dengan pengungkapan dan otoritas. Oleh karena itu, kerangka kerja tata kelola memaksimalkan sumber daya supaya bersinergi dan efisien dengan tujuan pengungkapan pertanggungjawaban pengelolaan manajemen sumber daya dengan menyelaraskan kepentingan pribadi, perusahaan dan masyarakat sebanyak mungkin.

### **Komisaris Independen dan Pengungkapan *Corporate Social Responsibility (CSR)***

Menurut Rao, *et al.* (2012) independensi merupakan perkara tata kelola yang kerap diperdebatkan yang dihadapi oleh perusahaan. Komisaris independen termasuk dalam dewan komisaris yang memiliki fungsi sebagai pengawas terhadap perusahaan dan memberikan pendapat kepada direksi. Dewan komisaris independen mayoritas harus terdiri dari non-eksekutif sehingga dapat melancarkan tanggung jawab dan kewajibannya dengan akurat.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 120 menetapkan bahwa anggaran dasar perusahaan dapat menata dan menangani keberadaan satu atau lebih komisaris independen melalui ketetapan RUPS dengan kriteria fraksi yang tidak memiliki afiliasi dengan anggota lain dari dewan komisaris, direksi atau pemegang saham utama. Penelitian sebelumnya yang meneliti mengenai pentingnya dewan independen kaitannya dengan perilaku pengungkapan CSR telah banyak dilakukan, salah satunya yaitu Rao, *et al.* (2012) dengan hasil studi yang mengungkapkan bahwa pengungkapan kinerja yang lebih baik dalam hal tanggung jawab sosial melalui dewan komisaris independen dengan rasio yang lebih tinggi.

H<sub>2</sub>: Komisaris independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

### **Kepemilikan Manajerial dan Pengungkapan *Corporate Social Responsibility (CSR)***

Kepemilikan dalam *corporate governance* mengandung atas kepemilikan pemegang saham, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan pemerintah. Sumilat & Destriana (2017) telah melakukan pengkajian sebelumnya tentang pentingnya kepemilikan manajerial terkait dengan kualitas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, yang menyatakan bahwa tingginya tingkat kepemilikan manajerial akan melancarkan peningkatan dalam hal kekayaan manajemen namun secara pribadi, yang menyebabkan kekayaan perusahaan semakin terikat dengannya, sehingga untuk mengurangi resiko kehilangan kekayaan manajemen akan dilakukan peningkatan dalam pengungkapan CSR.

Studi lain oleh Edison (2017) menunjukkan bahwa semakin tinggi kepemilikan manajerial dalam bisnis, semakin banyak manajemen dapat

bertanggung jawab kepada pemangku kepentingan perusahaan yang akan berpengaruh pada tercapainya program pengungkapan CSR. Melalui saham yang dimiliki manajerial akan memperluas organisator dalam memutuskan desain dan program-program akan pengungkapan perusahaan (Khan, Muttakin, & Siddiqui, 2013).

H3: Kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR).

### **Kepemilikan Asing dan Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR)**

Kepemilikan asing adalah institusi, negara, penduduk dan lembaga dari luar Indonesia yang melangsungkan permodalan. Konflik keagenan dapat muncul ketika terjadi masalah asimetri informasi, dalam menghadapi masalah ini pemegang saham asing potensial lebih rentan.

Penelitian Muttakin, *et al.* (2015) mendukung argumen tersebut, yang mana dalam memperoleh dana asing, dibutuhkan tingkat pengungkapan yang lebih besar karena hal ini mempresentasikan tindakan manajemen. Penelitian Muttakin, *et al.* (2015) membuktikan bahwa investor asing atau kepemilikan asing menuntut perusahaan untuk kualitas pengungkapan yang tinggi karena tingkat asimetri informasi yang tinggi, sehingga kepemilikan asing mengindikasikan hubungan positif dan bermakna dengan kualitas laporan yang disajikan oleh perusahaan.

H4: Kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR).

### **Aset Perusahaan dan Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR)**

Penelitian ini menggunakan tipe ukuran perusahaan yang akan digunakan dalam mengukur pengaruh *corporate governance* pada pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah variabel dalam aset perusahaan. Variabel ini terkait dengan teori keagenan, pengungkapan informasi akan dipengaruhi oleh biaya keagenan, demi memangkas *agency cost*, institusi dituntut melakukan pengungkapan informasi dengan komprehensif dan kompleks.

Konsep gagasan Cong, *et al.* (2011), perusahaan dengan ukuran perusahaan yang lebih besar akan membuat pengungkapan sosial dan lingkungan yang lebih baik, dan sebaliknya. Menurut Probohudono, Tower, & Rusmin (2013) volume *risk disclosure* dari kewajiban pengungkapan perusahaan memiliki korelasi positif dengan kriteria perusahaan, aset perusahaan merupakan faktor potensial sebagian perusahaan besar cenderung mengkomunikasikan *item* tanggung jawab sosial yang lebih menyeluruh.

H5: Aset perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR).

## METODE PENELITIAN

### Populasi dan Sampel

Data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder diperoleh dari penelitian online dalam bentuk laporan tahunan dan laporan pembangunan berkelanjutan untuk 2016-2018. Laporan keuangan tahunan dan laporan keberlanjutan akan didokumentasikan dan diproses dengan mengumpulkan informasi tentang publikasi variabel tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang akan disusun, dipelajari dan dipahami.

Penelitian ini menggunakan populasi yang terdiri dari industri perbankan di Indonesia 2016 hingga 2018. Pemilihan sampel menggunakan metode *purposive sampling*. Industri perbankan dipilih karena adanya desakan pemerintah mengenai publikasi tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia adalah *mandatory* atau wajib bagi perusahaan publik sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Implementasi Keuangan Keberlanjutan untuk Jasa Keuangan, Emiten dan Lembaga Perusahaan Publik. Bursa Efek Indonesia (BEI) mencantumkan 42 industri perbankan yang akan digunakan untuk studi ini berdasarkan data dari [ojk.go.id](http://ojk.go.id).

### Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Koneksi politik dalam laporan tahunan dapat dipelajari dari sudut pandang direktur dan dewan komisaris, serta dari sudut pandang pemerintah, yang memiliki ikatan dekat dengan partai politik atau lembaga pemerintah. Komisaris independen termasuk dalam dewan komisaris yang memiliki fungsi sebagai pengawas terhadap perusahaan dan memberikan pendapat kepada direksi. Kepemilikan administratif atau kepemilikan manajerial dari tata kelola perusahaan terdiri dari saham yang dimiliki oleh komite dan dewan yang dicatat dalam laporan tahunan. Kepemilikan asing adalah lembaga, negara, populasi dan institusi asing yang menjadikan modal pada masyarakat republik Indonesia. Aset perusahaan adalah nilai penjualan bersih atau nilai total aset perusahaan dalam periode penutupan (Cong, *et al.*, 2011).

Pengukuran koneksi politik, kepemilikan manajerial, kepemilikan asing dapat dilihat dari rasio masing-masing pos dibagi total saham masing-masing pos yang dimiliki perbankan tersebut. Sementara itu, pengukuran koneksi politik di dewan komisaris dan direksi acuannya adalah rasio. Jumlah komisaris independen dibagi dengan jumlah anggota komisaris yang dimiliki oleh masing-masing bank adalah pengukuran dari variabel komisaris independen. Perhitungan aset perusahaan diukur berdasarkan total aset pada akhir periode pelaporan.

Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah informasi tentang langkah-langkah sosial dan lingkungan perusahaan yang dilakukan oleh perusahaan. Pengukuran variabel dependen mengacu pada penelitian Pradipta (2015). Formula untuk menghitung indeks pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan diukur dengan rasio berdasarkan dua jenis, yaitu GRI-G4 dan indikator *GRI-Standards*. Pengukuran dengan dua jenis GRI tersebut menyesuaikan laporan yang

dikeluarkan oleh perusahaan. GRI (*Global Reporting Initiatives*) yang disinkronkan terdiri dari 91 *item* dengan 44 indikator GRI-G4 dan 136 *item* dari *GRI-Standards* dengan 36 indikator yang terdiri dari seri 100, 200, 300, dan 400. Penghitungan indeks dengan memasukkan angka 1 untuk elemen yang diungkapkan dan angka 0 untuk bank yang tidak mengungkapkan. Elemen GRI yang tercantum dibagi dengan jumlah elemen pengungkapan dan dikalikan dengan 100 persen.

Setelah dilakukan penilaian terhadap seluruh item CSR berdasarkan indeks GRI yang telah disesuaikan (Pradipta, 2015), langkah selanjutnya adalah menguji dengan analisis regresi linier berganda yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen (pengungkapan skor CSR yang telah diberi skor) dengan persamaan berikut:

$$PCSR = b + b_1KP + b_2KPKP + b_3KOMIN + b_4KM + b_5KA + b_6SIZE + b_7AGE + e$$

Keterangan:

PCSR = Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR)

K = Koneksi Politik (Koneksi Politik dari Dewan

Komisaris/Direksi) KPKP = Koneksi politik (Koneksi Politik dari kepemilikan pemerintah) KOMIN = Komisaris Independen

KM = Kepemilikan manajerial

KA = Kepemilikan Asing

SIZE = Aset Perusahaan

AGE = Umur Perusahaan

E = Eror

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### Deskripsi Sampel

Topik yang digunakan dalam penelitian ini adalah industri perbankan di Indonesia, yang memilih metode pengambilan sampel dengan *purposive sampling*. Berdasarkan data dari ojk.go.id daftar bank umum pada bulan desember 2019 sejumlah 97 bank terdiri dari 4 bank negara, 60 bank swasta nasional, 25 bank pembangunan daerah dan 8 cabang bank asing. Di Indonesia terdapat tiga jenis perbankan yaitu bank komersial, bank perkreditan rakyat, dan bank syariah. Studi ini menggunakan sampel bank umum yang melaporkan laporan tahunan dan laporan keberlanjutan secara terpisah selama 2016-2018. Bank umum adalah bank yang menyediakan kegiatan pembayaran rutin. Hasil penentuan sampel dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1**  
**Hasil Penentuan Sampel**

Parameter Sampel	Kuantitas Industri	Jumlah Tahun Pelaporan Perusahaan (2016-2018)
Industri Perbankan di Indonesia	42	126
Perbankan yang tidak melaporkan laporan tahunan dan laporan keberlanjutan secara terpisah periode 2016-2018	(31)	(93)
Jumlah sampel	11	33

Sumber: hasil olah data sekunder, 2020.

Data yang digunakan adalah dari laporan tahunan dan laporan keberlanjutan perbankan Indonesia pada 2016-2018. Hasil pemilihan sampel dengan *purposive sampling* menunjukkan sebanyak 33 laporan keuangan dari 11 perusahaan sektor perbankan pada tahun 2016-2018.

### Uji Statistik Deskriptif

Pengujian ini diharapkan informasi berupa nilai terendah, tertinggi, rerata dan standar deviasi yang dihitung dengan menggunakan alat bantu *statistic SPSS release 25* (Ghozali, 2018). Data yang ditampilkan adalah data variabel terkait koneksi politik, komisaris independen, kepemilikan manajerial, kepemilikan asing, aset perusahaan, dan umur perusahaan yang dihitung oleh rasio penelitian dari laporan keuangan untuk periode 2016-2018. Presentasi analisis statistik deskriptif dari data penelitian disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 2**  
**Uji Statistik Deskriptif**

	<i>N</i>	<i>Minimum</i>	<i>Maximum</i>	<i>Mean</i>	<i>Std. Deviation</i>
KP	33	1	7	3,45	1,889
KPKP	33	0,000	0,800	0,36576	0,327863
KOMIN	33	0,43	0,80	0,5733	0,10827
KM	33	0,000000	0,002006	0,00038612	0,000578804
KA	33	0,000	0,983	0,39570	0,304553
SIZE	33	43032950000	1296898292000	43949154224242	404836404455881
PCSR	33	0,16	0,75	0,3882	0,12665
AGE	33	22	74	50,55	17,447
Valid <i>N</i> (listwise)	33				

Sumber: data sekunder yang diolah dengan Statistik SPSS *release 25*, 2020.

Pengujian statistik deskriptif pada tabel 2 mendapatkan hasil yang memperlihatkan bahwa variabel koneksi politik dari dewan komisaris dan direksi memiliki nilai terendah hanya terdapat 1 orang pada Bank

Permata dan Bank Cimb Niaga tahun 2016-2018 kemudian nilai tertinggi sejumlah 7 orang di Bank Negara Indonesia tahun 2016. Ini menunjukkan bahwa setiap perusahaan di sektor perbankan memiliki hubungan politik antara dewan eksekutif dan/atau anggota dewan direksi. Berdasarkan hasil penelitian, mereka yang terkoneksi politik adalah sedang menjabat atau pernah menjabat sebagai anggota parlemen dan pegawai negeri sipil tingkat tinggi memiliki koneksi politik dengan anggota komisi dan/atau dewan direksi.

Nilai minimum dari variabel koneksi politik kepemilikan pemerintah adalah 0 (nol) atau 0%, yang terdapat pada beberapa perusahaan sektor perbankan dalam penelitian ini diantaranya yaitu Bank Central Asia, Bank Permata dan Bank Cimb Niaga tahun 2016-2018. Hal ini disebabkan tidak ada investasi saham pemerintah pada bank tersebut dan nilai maksimum cukup tinggi sebesar 0,80 atau 80% pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur tahun 2016-2018. Selama tiga tahun, koneksi politik dari kepemilikan pemerintah yang tertinggi terdapat pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur yang mana bank tersebut merupakan bank umum BUMN sedangkan nilai terendah terdapat pada bank umum swasta.

Variabel komisaris independen memiliki nilai minimum 0,43 atau 43% yang terdapat pada Bank Tabungan Negara tahun 2016, yang artinya jumlah ini kurang dari jumlah minimal komisaris independen yang ditentukan dalam OJK, Surat Edaran Nomor: 13/SEOJK.03/2017 mengenai Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, yaitu, komisaris independen akan mempertimbangkan setidaknya 50% (lima puluh persen) dari semua anggota komite. Jumlah komisaris independen tertinggi terdapat pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten sebesar 0,8 atau 80% selama tahun 2016-2018. Sementara itu, rata-rata proporsi komisaris independen selama tahun 2016-2018 sebesar 0,5733 atau 57,33%. Jumlah ini melebihi jumlah minimal komisaris independen yang telah ditentukan oleh OJK. Ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan terhadap hukum dan nilai-nilai etika yang diterima secara umum di industri perbankan adalah baik.

Variabel kepemilikan manajerial memiliki nilai terendah nihil atau 0% terkandung dalam Bank Permata dan Bank Maybank Indonesia selama tahun 2016-2018 hal ini disebabkan manajemen pada bank tersebut tidak berkenan membeli saham pada perusahaan yang dioperasikannya. Bank dengan kepemilikan manajerial terbanyak sebesar 0,002006 atau 0,2006% yaitu Bank Central Asia tahun 2016. Sementara itu, rata-rata kepemilikan manajerial selama tahun 2016-2018 sebesar 0,00038612 atau 0,39%.

Variabel kepemilikan asing mendapat rerata 0,395 atau 39,5% untuk tahun 2016-2018. Selama tiga tahun, kepemilikan asing pada perbankan fluktuatif dengan kepemilikan tertinggi sebesar 0,983 atau 98,3% pada Bank Maybank Indonesia tahun 2016. Bank dengan kepemilikan asing terendah sebesar 0 atau 0% yaitu Bank Bukopin tahun 2016.

Variabel aset perusahaan adalah Rp 43.032.950.000.000.- pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur tahun 2016 dan nilai maksimum sebesar

Rp 1.296.898.292.000.000,- pada Bank Rakyat Indonesia tahun 2018. Nilai *mean* (rata-rata) aset perusahaan Rp. 439.491.542.242.424,- dan standar deviasi sebesar Rp. 404.836.404.455.881,- yang cenderung lebih rendah dengan nilai rerata nya.

Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dengan rata-rata 0,388 atau 38,8% untuk ambang minimum 0,16 atau 16% oleh BNGA pada 2016 dan ambang tertinggi pada 0,75 atau 75% oleh Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur pada 2018 dalam mengikuti syarat GRI. Variabel kontrol umur perusahaan memiliki mean (rata-rata) sebesar 50,55 tahun dengan umur termuda yaitu 22 tahun pada Bank Mandiri dan umur tertua 74 tahun pada Bank Negara Indonesia.

### Uji Asumsi Klasik

#### Uji Normalitas

*Kolmogorov-Smirnov* (K-S) metode yang dipilih untuk menguji kondisi normalitas studi ini. Presentasi hasil tes normalitas dengan tabel berikut:

**Tabel 3**  
**Normalitas Test**

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		33
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	0,09502463
Most Extreme Differences	Absolute	0,115
	Positive	0,115
	Negative	-0,058
Test Statistic		0,115
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,200 <sup>c,d</sup>

Sumber: data sekunder diolah dengan Statistik SPSS *release 25*, 2020.

Tabel 3 menunjukkan bahwa signifikansi data yakni 0,200 atau lebih besar dari 0,05. Kesimpulannya, data dalam penelitian ini terdistribusi secara normal atau memenuhi pengujian normalitas dengan ukuran sampel 33.

#### Uji Autokorelasi

Tujuan pengujian ini yakni guna menentukan apakah ada hubungan autokorelasi atau tidak, ditentukan dengan uji *Runs Test*. Dalam penelitian ini, hubungan autokorelasi ditemukan menggunakan *Runs Test*. Presentasi hasil pengujian ditampilkan pada tabel berikut:

**Tabel 4**  
**Runs Test**

<b>Runs Test</b>	Unstandardized Residual
Test Value <sup>a</sup>	-0,02399
Cases < Test Value	16
Cases >= Test Value	17
Total Cases	33
Number of Runs	19
Z	0,359
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,719

Sumber: data sekunder yang diolah dengan Statistik SPSS *release 25*, 2020.

*Runs Test*, yang menunjukkan bahwa nilai tes adalah -0,02399 dengan probabilitas atau nilai *Asymp Sig. (2-tailed)* 0,719 yang berarti lebih besar dari 0,05. Pengujian autokorelasi menunjukkan residu acak atau tidak ada hubungan otomatis antara nilai yang tersisa (residual).

#### Uji Multikolonieritas

Tujuan Uji Multikolonieritas adalah untuk menguji apakah ada hubungan antara variabel koneksi politik dan *corporate governance* suatu organisasi dalam bentuk regresi, dengan melihat toleransi dan faktor inflasi yang berlawanan (VIF). Presentasi hasil pengujian ditampilkan pada tabel berikut:

**Tabel 5**  
**Hasil Uji Multikolonieritas**

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
KP	0,417	2,400
KPKP	0,328	3,045
KOMIN	0,420	2,381
KM	0,578	1,729
KA	0,305	3,279
SIZE	0,431	2,318
AGE	0,381	2,624

Sumber: data sekunder diolah dengan Statistik SPSS *release 25*, 2020.

Tabel 5 menunjukkan hasil pengujian multikolonieritas bahwa terdapat nilai *tolerance* >0,1 dan nilai VIF <10 pada semua variabel. Kesimpulan uji multikolonieritas tidak terdapat multikolonieritas antar variabel bebas.

## Pengujian Hipotesis

### Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) dimaksudkan untuk mengukur kemampuan variabel-variabel independen dalam model regresi. Presentasi hasil pengujian ditampilkan pada tabel berikut:

**Tabel 6**

**Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

<b>Model Summary</b>				
	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,661 <sup>a</sup>	0,437	0,307	0,10542

a. Predictors: (Constant), SIZE, AGE, KM, KPKP, KP, KOMIN, KA

Sumber: data sekunder yang diolah dengan Statistik SPSS *release 25*, 2020.

Tabel 6 menunjukkan bahwa nilai yang disesuaikan dari *R Square* adalah 0,307. Dengan penjelasan, tabel ini menunjukkan bahwa variabel independen dan variabel kontrol memiliki efek 30,7% terhadap variabel dependen. Kemudian, sisanya sebanyak 69,3% variabel dependen dipengaruhi oleh faktor lain.

### Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Program *statistic SPSS release 25* digunakan sebagai bantuan dalam melakukan pengujian studi ini. Presentasi hasil pengujian ditampilkan pada tabel berikut:

**Tabel 7**

**Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)**

<b>ANOVA<sup>a</sup></b>						
Model		Sum of	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	0,238	7	0,034	3,093	0,017 <sup>b</sup>
	Residual	0,275	25	0,011		
	Total	0,513	32			

a. Dependent Variable: PCSR

b. Predictors: (Constant), AGE, KP, KM, KOMIN, SIZE, KPKP, KA

Sumber: data sekunder diolah dengan Statistik SPSS *release 25*, 2020.

Hasil pengujian pada Tabel 7, nilai Sig. menunjukkan angka 0,017, yang berarti bahwa nilai Sig. lebih rendah dari tingkat signifikansi 0,05 atau 5% dan nilai F hitung adalah 3,093. Oleh karena itu, nilai ini menunjukkan bahwa variabel independen yang terdiri dari Koneksi Politik dalam hal komisaris dan direksi, serta kepemilikan pemerintah, Komisaris Independen, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Asing, dan Aset

Perusahaan secara simultan mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Hasil uji signifikansi simultan juga mengindikasikan bahwa model regresi dalam penelitian ini dimungkinkan untuk digunakan dalam penelitian.

### Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Berdasarkan pengujian dengan menggunakan bantuan program *statistic SPSS release 25*. Presentasi hasil pengujian ditampilkan pada tabel berikut:

**Tabel 8**  
**Hasil Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)**

		Unstandardized		Standardized		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	1,116	0,191		5,844	0,000
	KP	0,004	0,015	0,058	0,255	0,800
	KPKP	0,087	0,099	0,225	0,881	0,387
	KOMIN	-1,035	0,264	-0,885	-3,917	0,001
	KM	109,707	42,123	0,501	2,604	0,015
	KA	-0,195	0,110	-0,469	-1,769	0,089
	SIZE	-1,078E-16	0,000	-0,345	-1,546	0,135
	AGE	-0,002	0,002	-0,267	-1,124	0,272

a. Dependent Variable: PCSR

Sumber: data sekunder diolah dengan Statistik SPSS *release 25*, 2020.

Berdasarkan hasil pengujian yang terdapat pada tabel 8, model linier regresi berganda yang digunakan dalam penelitian ini dapat diperoleh. Analisis regresi berganda dapat memperlihatkan hubungan antara lebih dari dua variabel. Dari hasil uji statistik t di atas, regresi dapat ditemukan seperti berikut:

$$\text{PCSR} = 1,116 + 0,004 \text{ KP} + 0,087 \text{ KPKP} - 1,035 \text{ KOMIN} + 109,707 \text{ KM} - 0,195 \text{ KA} - 1,078\text{E-}16 \text{ SIZE} - 0,002 \text{ AGE} + e$$

Disimpulkan bahwa komisaris independen (KOMIN), kepemilikan asing (KA), aset perusahaan (SIZE) dan variabel umur perusahaan (AGE) memiliki efek negatif terhadap pengungkapan CSR. Sementara variabel lain, seperti koneksi politik dari direksi dan dewan komisaris (KP) maupun dari kepemilikan pemerintah (KPKP) dan kepemilikan manajerial (KM) memiliki dampak positif pada pengungkapan CSR.

### **Pembahasan Hasil Uji Hipotesis**

#### **Koneksi Politik dan Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR)**

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari penelitian, koneksi politik dari segi dewan komisaris dan direksi menunjukkan bahwa tidak berpengaruh pada pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) di industri perbankan Indonesia. Hasil penelitian yang didapatkan ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Osazuwa, *et al.* (2015) dan Muttakin, *et al.* (2018). Hasil penelitian konsisten dengan penelitian Huang, *et al.* (2016) bahwa hasilnya menunjukkan bahwa koneksi politik tidak terkait dengan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Temuan hasil studi koneksi politik, menyatakan bahwa memecah berbagai pemangku kepentingan dengan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), tidak akan memengaruhi pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) untuk indeks kriteria tertentu. Hasil ini adalah bukti nyata untuk komisaris dan direksi terkoneksi politik lebih banyak tujuan dalam mencapai tujuan pemerintah terkait dengan ekonomi dan kepentingan politik perusahaan.

Sementara itu, koneksi politik dari kepemilikan pemerintah juga tidak mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Hasil studi ini tidak konsisten dengan hipotesis penelitian. Akan tetapi, hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Huang, *et al.* (2016) yang hasilnya menunjukkan bahwa koneksi politik tidak terkait dengan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Argumen tersebut cukup beralasan dikarenakan jumlah keikutsertaan saham pemerintah dalam perusahaan sampel sangat kecil karena sebagian besar perusahaan perbankan di Indonesia adalah milik swasta. Oleh karena itu, tekanan pada transparansi pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) melalui laporan pembangunan berkelanjutan tidak sekuat bank pemerintah dalam bentuk perusahaan publik.

#### **Komisaris Independen dan Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR)**

Secara statistik komisaris independen memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap pengungkapan data CSR di industri perbankan Indonesia. Hasil penelitian yang didapatkan ini tidak sejalan dengan penelitian Rao *et al.* (2012), Muttakin *et al.* (2015), dan Cong *et al.* (2011).

Hasil studi ini sesuai dengan studi Purbopangestu & Subowo (2014) yang menyatakan komisaris independen hanya memiliki kekuatan untuk mengawasi operasi perusahaan untuk memenuhi tujuan perusahaan yang telah ditentukan, termasuk tujuan menambah nilai bagi perusahaan. Pengambilan keputusan program CSR memerlukan wewenang yang tak terbatas, sehingga meskipun jumlah komisaris independen memiliki proporsi yang tinggi tetap tidak memiliki wewenang cukup untuk ikut merancang program CSR.

### **Kepemilikan Manajerial dan Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR)**

Hasil uji statistik membuktikan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Ini menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) di industri perbankan Indonesia. Hasil penelitian ini sejalan dengan Widyaningsih (2018), yang menetapkan bahwa saham yang dimiliki eksekutif memiliki hubungan langsung dan searah dengan pengungkapan praktik lingkungan dan sosial, semakin tinggi kuantitas saham yang dimiliki golongan manajemen perusahaan maka semakin tinggi pula kuantitas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Menurut teori agensi, manajemen sebagai agen biasanya cenderung meningkatkan kinerja untuk kepentingan dirinya melalui pemberian insentif atau kompensasi yang sebesar-besarnya. Oleh karena itu, jumlah besar saham yang dimiliki oleh eksekutif dapat mengurangi biaya agen, karena itu mengurangi konflik agen dan menyeimbangkan relevansi kelompok manajemen dan pemegang saham untuk dapat menikmati profit. Sumilat *et al.* (2017) menunjukkan bahwa proporsi saham manajerial dengan jumlah tinggi akan memaksimalkan kekayaan manajemen secara pribadi.

### **Kepemilikan Asing dan Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR)**

Kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) berdasarkan hasil penelitian ini. Temuan penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Muttakin *et al.* (2015) yang mengatakan bahwa kepemilikan asing memiliki efek positif yang signifikan terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Farida & Abdullah (2018) yang membuktikan bahwa kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR), hal ini dapat disebabkan oleh kepemilikan asing yang hanya berfokus pada keuntungan pribadi tetapi tidak pada kinerja perusahaan yang ditunjuk untuk investasi dalam sahamnya. Selain itu, kemungkinan lain pengungkapan tanggung jawab sosial hanya sekedar pengungkapan untuk formalitas perusahaan karena adanya undang-undang yang mengatur.

### **Aset Perusahaan dan Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR)**

Aset perusahaan dalam hasil pengujian statistik menunjukkan tidak adanya pengaruh terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada industri perbankan di Indonesia. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan Cong, *et al.* (2011) dan Probodudono, *et al.* (2013) yang menetapkan bahwa ukuran perusahaan dalam hal aset

perusahaan mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil Sudarmadji *et al.* (2007), Pradnyani *et al.* (2015), Oktariani & Mimba (2014), dan Ebiringa, Yadirichukwu, Chigbu, dan Ogochukwu (2013) bahwa kriteria perusahaan dari segi aset perusahaan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Hal ini dapat didukung dengan argumen bahwa setiap perusahaan dihadapi dengan masalah-masalah yang berbeda-beda dalam menghadapi pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Situasi dan kondisi yang banyak serta berubah-ubah yang menyebabkan masalah-masalah tersebut berbeda pada suatu perusahaan. Contohnya, peraturan perusahaan sangat ketat dan tidak dapat menangani masalah-masalah terkait program CSR. Oleh karena itu, baik perusahaan dengan aset besar atau kecil memiliki pemahaman sendiri dalam memandang penting atau tidaknya terpenuhinya program pengungkapan CSR. Pemahaman inilah yang menentukan apakah perusahaan akan menerapkan program CSR dengan benar.

## **SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Kesimpulan hasil penelitian ini yaitu variabel Koneksi Politik dari segi Dewan Komisaris dan Direksi, Kepemilikan Pemerintah, Kepemilikan Asing, dan Aset Perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Sedangkan variabel Komisaris Independen memiliki pengaruh negatif terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Kemudian variabel Kepemilikan Manajerial berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR).

### **Keterbatasan**

Masih kurangnya referensi penelitian serupa tentang pengaruh koneksi politik sehingga peneliti kurang memperoleh referensi penelitian yang berkaitan dengan koneksi politik terhadap variabel dependen penelitian. Kurangnya referensi penelitian serupa tentang subjek penelitian yaitu industri perbankan di Indonesia. Sehingga peneliti kurang memperoleh referensi yang berkaitan dengan subjek penelitian pada jasa keuangan atau perbankan di Indonesia. Terbatasnya sampel penelitian yang dikarenakan dari 42 bank *go public* hanya terdapat 11 bank konvensional yang melaporkan laporan tahunan dan *sustainability report* secara terpisah. Penggunaan studi penelitian hanya dilakukan pada tiga tahun terakhir, sehingga dimungkinkan data yang diuji akan kurang menggambarkan bagaimana keadaan perubahan variabel dan pengaruhnya terhadap pengungkapan CSR dalam industri perbankan di Indonesia. Kurangnya referensi studi tentang pengukuran pengungkapan CSR dengan indikator *GRI-Standards* sehingga peneliti kurang memperoleh referensi mengenai pengukuran pengungkapan CSR dengan indikator yang telah di *update* atau terbaru. Nilai konsisten

determinasi pada penelitian ini sebesar 30,7% yang artinya sebesar 69,3% variabel dependen dipengaruhi oleh faktor-faktor lain.

### Saran

Peneliti selanjutnya harus meningkatkan jumlah penelitian untuk mengurangi subjektivitas dalam mengukur tingkat pengungkapan CSR. Melakukan perbandingan pengungkapan CSR perusahaan perbankan di Indonesia dengan sektor perbankan di negara lain atau tambahkan sektor industri lainnya untuk hasil sampel yang lebih baik. Sebaiknya penelitian selanjutnya meningkatkan periode penelitian untuk mendapatkan jumlah sampel yang lebih besar untuk melihat bagaimana variasi bervariasi antara tahun penelitian dan menambahkan variabel lain yang memiliki pengaruh lebih besar, karena jumlah pengaruh signifikan pada variabel dependen dalam penelitian ini hanya 30,7%.

### DAFTAR PUSTAKA

- Ali, S. M., & Isa, M. A. 2018. Firms Attributes and Corporate Social Responsibility Disclosure: A Literature Review. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*. 8(4): 312–325.
- Arora, M. P., & Lodhia, S. 2017. The BP Gulf of Mexico oil spill: Exploring the link between social and environmental disclosures and reputation risk management. *Journal of Cleaner Production*. 140: 1287–1297.
- Bebbington, J., Larrinaga, C., & Moneva, J.M. 2008. Corporate social reporting and reputation risk management. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*. 21(3): 337–361.
- Chen, D; Y. Guan; T. Zhang; dan G. Zhao. 2017. Political connection of financial intermediaries: Evidence from China's IPO market. *Journal of Banking and Finance*. 76: 15-31.
- Cong, Y., dan Freedman, M. 2011. Corporate governance and environmental performance and disclosures. *Advances in Accounting*. 27 (2): 223–232.
- Ebiringa, O. T., Yadirichukwu, E., Chigbu, E. E., & Ogochukwu, O. J. 2013. Effect of firm size and profitability on corporate social disclosures: The Nigerian oil and gas sector in focus. *British Journal of Economics, Management & Trade*. 3(4): 563-574.
- Edison, A. 2017. Struktur Kepemilikan Asing, Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Manajerial Pengaruhnya Terhadap Luas Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR). *Bisma*. 11(2): 164-175.
- Faccio M., M. Masulis, R. W., dan McConnell, J. J. 2006. Political Connections and Corporate Bailouts. *The Journal of Finance*. 61(6) : 2597–2635.
- Farida, N. N., & Abdullah, R. 2018. Pengaruh Ukuran Perusahaan dan Struktur Kepemilikan Terhadap Tingkat Pengungkapan Corporate Social Responsibility (Studi pada Perusahaan Bank

- Konvensional yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2016. *Perbanas Review*. 3(2).
- Ghozali, I. 2018. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Global Reporting Initiative. 2018. Sector Guidance GRI, <https://www.globalreporting.org/information/sector-guidance/>, diakses pada 12 Mei 2020 pukul 22:30.
- Hill, C. L., & Jones T. J. 1992. Stakeholder- Agency Theory. *Journal of Management Studies*. 29 (2): 0022-2380.
- Honggowati, S., Rahmawati, R., Aryani, Y. A., & Probohudono, A. N. 2017. Corporate governance and strategic management accounting disclosure. *Indonesian Journal of Sustainability Accounting and Management*. 1(1):23-30.
- Huang, H., & Zhao, Z. 2016. The influence of political connection on corporate social responsibility evidence from Listed private companies in China. *International Journal of Corporate Social Responsibility*. 1(1).
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2009. Standar Akuntansi Keuangan, PSAK No. 1 : Penyajian Laporan Keuangan. Jakarta: Salemba Empat.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. 1976. Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*. 3(4): 305–360.
- Kathy Rao, K., Tilt, C. A., & Lester, L. H. 2012. Corporate governance and environmental reporting: an Australian study. *Corporate Governance: The International Journal of Business in Society*. 12(2): 143–163.
- Khan, A., Mihret, D. G., dan Muttakin, M. B. 2016. Corporate political connections, agency costs and audit quality. *International Journal of Accounting & Information Management*. 24 (4): 357–374.
- Khan, H. 2010. The effect of corporate governance elements on corporate social responsibility (CSR) reporting. *International Journal of Law and Managemen*. 52(2): 82-109.
- Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance. 2004. Pedoman Good Corporate Governance Perbankan Indonesia. Jakarta.
- Muttakin, M. B., Khan, A., & Belal, A. R. 2015. Intellectual capital disclosures and corporate governance: An empirical examination. *Advances in Accounting*. 31(2): 219–227.
- Muttakin, M. B., Mihret, D. G., & Khan, A. 2018. Corporate political connection and corporate social responsibility disclosures. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*. 31(2): 725–744.
- Nur Probohudono, A., Tower, G., & Rusmin, R. 2013. Risk disclosure during the global financial crisis. *Social Responsibility Journal*. 9(1): 124–137.
- Nurjanah, A. dan F. Yulia. 2019. Pelaksanaan Program Corporate Social Responsibility (CSR) dan Komunikasi CSR (Studi Kasus: CSR Delegation European Union To Malaysia dan CSR PT. Holcim

- Indonesia Tbk. Cilacap Plant). *Profetik Jurnal Komunikasi*. 12 (1) : 1979-2522.
- Oktariani, N. W., & Mimba, N. P. S. H. 2014. Pengaruh karakteristik perusahaan dan tanggung jawab lingkungan pada pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. *E-Jurnal Akuntansi*. 6 (3): 402-418.
- Osazuwa, N.P., Che-Ahmad, A., & Che-Adam, N. 2015. A theoretical framework on the relationship between political connection, board characteristics and environmental disclosure in Nigeria. *International Conference on Accounting Studies (ICAS)*.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2017. Peraturan OJK Nomor 51/POJK.03/2017 Tentang Penerapan Keuangan Keberlanjutan Kepada Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, diakses pada tanggal 30 Oktober 2019 pukul 19.34.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2019. Statistik Perbankan Indonesia, <https://ojk.go.id/id/kanal/perbankan/data-dan-statistik/statistik-perbankan-indonesia/Default.aspx>, diakses pada 7 April 2020 pukul 20.23.
- Pertiwi, D.S. 2018. Peringkat tata kelola emiten Indonesia naik di jajaran ASEAN, <https://investasi.kontan.co.id/news/peringkat-tata-kelola-emiten-indonesia-naik-di-jajaran-asean>, diakses pada 06 November 2019 pukul 02.10.
- Pradipta, D. H. 2015. Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR), Profitabilitas, Leverage, dan Komisaris Independen Terhadap Praktik Penghindaran Pajak. *Universitas Gadjah Mada*.
- Pradnyani, I. G. A. A., & Sisdyani, E. A. 2015. Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Dan Ukuran Dewan Komisaris Pada Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. *E-Jurnal Akuntansi*. 384-397.
- Purbopangestu, H. W., & Subowo, S. 2014. Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Nilai Perusahaan dengan Corporate Social Responsibility sebagai Variabel Intervening. *Accounting Analysis Journal*. 3(3).
- Republik Indonesia. 2007. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2015. Peraturan Menteri BUMN Nomor 09/MBU/VII/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Suchman, M. C. (1995). Managing Legitimacy: Strategic and Institutional Approaches. *Academy of Management Review*.20(3): 571-610.
- Sudarmadji, A. M., & Sularto, L. 2007. Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, dan Tipe Kepemilikan Perusahaan Terhadap Luas Voluntary Disclosure Laporan Keuangan Tahunan. *Proceeding Pesat (Psikologi, Ekonomi, Sastra, Arsitek & Sipil)*. 2: 1858-2559.

- Sumilat, H., & Destriana, N. 2017. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Corporate Social Responsibility. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*. 19(1a-2): 129-140.
- Sun, N., Salama, A., Hussainey, K., & Habbash, M. 2010. Corporate environmental disclosure, corporate governance and earnings management. *Managerial Auditing Journal*. 25(7): 679–700.
- Trisnawati, R. 2014. Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Ukuran Dewan Komisaris Dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) Industri Perbankan di Indonesia. *Syariah Accounting Paper FEB-UMS*. 2 (6): 978-602.
- Wareza, M. 2018. OJK Minta Emiten Sampaikan Kegiatan CSR, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20180110092141-17-1088/ojk-minta-emiten-sampaikan-kegiatan-csr>, diakses pada 08 Desember 2019 pukul 23.30.
- Widyaningsih, D. 2018. Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, Serta Komite Audit Pada Nilai Perusahaan Dengan Pengungkapan CSR sebagai Variabel Moderating dan Firm Size sebagai Variabel Kontrol. *Jurnal akuntansi dan Pajak*. 19(1): 38-52.
- Wu, W., Wu, C., Zhou, C., & Wu, J. 2012. Political connections, tax benefits and firm performance: Evidence from China. *Journal of Accounting and Public Policy*. 31(3): 277–300.